

KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS

**Nida Rahmadhina Kamila¹, Tarra Aulia Mulyana², Mohammad Ilham
Rusdi³, Muhammad Adam Fauzan⁴, Eko Ribawati⁵**

Author email: 2288230055@untirta.ac.id

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung
Tirtayasa, Jl. Ciwaru Raya No.25 Serang, Banten, 42117, Telp/Fax (0254) 2280330

Abstract

Poverty and crime are interrelated phenomena and have long historical roots in Java. This research aims to examine the relationship between poverty, the feudal system, and crime in Java in the past, with a focus on appanage practices, the role of bekel, and the phenomenon of banditry. The research method used is library research, by collecting and analyzing written sources such as books, journals, manuscripts and related historical documents. Through an in-depth study of various literary sources, this research reveals how the appanage system, which gave land to relatives or cronies of the ruler, led to extortion and exploitation of the people by the bekels. The condition of poverty, which is exacerbated by the arbitrary actions of these bekels, triggers the emergence of banditry or street robbers who rob villages for survival or as a form of resistance to injustice. In-depth analysis of historical sources shows that the authorities' efforts to suppress banditry with severe punishments did not address the root of the problem, namely structural poverty and injustice resulting from the feudal system. This research highlights the need for agrarian reform and fairer governance to break the vicious cycle of poverty and crime in Java in the past.

Keywords: *Poverty, Crime, Appanage, Bekel, Banditism,*

Abstrak

Kemiskinan dan kriminalitas merupakan fenomena yang saling berkaitan dan memiliki akar sejarah yang panjang di Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kemiskinan, sistem feodal, dan kriminalitas di Jawa pada masa lalu, dengan fokus pada praktik apanage, peran bekel, dan fenomena banditisme. Metode penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen sejarah terkait. Melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber kepustakaan, penelitian ini mengungkap bagaimana sistem apanage, yang memberikan tanah kepada kerabat atau kroni penguasa, menyebabkan pemerasan dan eksploitasi rakyat oleh para bekel. Kondisi kemiskinan yang diperparah oleh tindakan sewenang-wenang bekel ini memicu munculnya banditisme atau perampok-perampok jalanan yang merampok desa-desa demi bertahan hidup atau sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Analisis mendalam terhadap sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa upaya penguasa untuk menekan banditisme dengan hukuman berat tidak mengatasi akar masalah, yaitu kemiskinan struktural dan ketidakadilan akibat sistem feodal. Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi agraria dan pemerintahan yang lebih adil untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dan kriminalitas di Jawa pada masa lalu.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kriminalitas, Apanage, Bekel, Banditisme,

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kriminalitas merupakan dua hal yang saling terkait erat. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal, termasuk di wilayah Jawa pada masa lalu. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam menghubungkan kemiskinan dengan kriminalitas di Jawa, yaitu apanage dan bekel, banditisme (bandit-bandit di Jawa), latar belakang sosial ekonomi masyarakat Jawa, dan sikap dasar perbanditan. Apanage dan bekel merupakan sistem pemberian tanah oleh pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan Jawa sebagai upah atau imbalan

atas jasa mereka. Namun, praktik ini seringkali disalahgunakan oleh para bangsawan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memungut pajak yang tinggi dari rakyat jelata (Ricklefs, 2001). Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara para bangsawan dengan rakyat jelata, yang pada akhirnya memicu munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan. Salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah banditisme atau gerakan bandit-bandit di Jawa. Para bandit ini seringkali berasal dari kalangan rakyat jelata yang merasa tertindas secara ekonomi dan sosial. Mereka melakukan tindakan kriminal seperti perampokan dan pencurian sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan para bangsawan yang dianggap menindas (Nordholt, 2002). Latar belakang sosial ekonomi masyarakat Jawa juga menjadi faktor penting dalam memahami fenomena kemiskinan dan kriminalitas di wilayah ini. Sebagian besar masyarakat Jawa pada masa lalu hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang memadai (Geertz, 1963). Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal. Selain itu, terdapat sikap dasar perbanditan yang melekat dalam budaya masyarakat Jawa. Sikap ini mencerminkan semangat perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, serta keinginan untuk mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia (Benda & Irikura, 1965). Sikap dasar perbanditan ini seringkali menjadi motivasi bagi sebagian masyarakat Jawa untuk terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan, termasuk melalui tindakan kriminal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian sejarah yaitu studi kepustakaan/literatur (library research) dari berbagai sumber tertulis tentang kemiskinan dan kriminalitas di Jawa. Bahan-bahan rujukan utama dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang relevan dengan topik ini. Berbagai sumber tertulis tersebut dikaji dengan analisis isi (content analysis) untuk menyarikan data dan informasi relevan terkait kemiskinan dan kriminalitas di Jawa, praktik apanage dan bekel memicu kemiskinan dan kriminalitas di Jawa dan sikap dasar perbanditan. Hasil analisis isi kemudian disintesis menjadi suatu uraian yang ringkas dan sistematis tentang kemiskinan dan kriminalitas di Jawa. Studi kepustakaan dilakukan secara komprehensif untuk menghasilkan sintesis dan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Kemiskinan dan kriminalitas merupakan dua hal yang saling terkait erat. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal, termasuk di wilayah Jawa pada masa lalu. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam menghubungkan kemiskinan dengan kriminalitas di Jawa, yaitu apanage dan bekel, banditisme (bandit-bandit di Jawa), latar belakang sosial ekonomi masyarakat Jawa, perluasan perkebunan dan sikap dasar perbanditan.

Apanage dan bekel merupakan sistem pemberian tanah oleh pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan Jawa sebagai upah atau imbalan atas jasa mereka. Namun, praktik ini seringkali disalahgunakan oleh para bangsawan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memungut pajak yang tinggi dari rakyat jelata (Ricklefs, 2001). Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara para bangsawan dengan rakyat jelata, yang pada akhirnya memicu munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan. Dalam masyarakat tradisional, bekel menguasai seluruh tenaga kerja yang ada di tanah apanage. Antara tahun 1839-1920 terjadi perubahan status terkait peranan bekel di pedesaan Surakarta. Bekel menguasai seluruh tenaga kerja yang ada di tanah apanage, setelah tanah tersebut disewa oleh Perusahaan perkebunan, hak-hak yang ada pada patuh beralih kepada perusahaan perkebunan. Selama abad ke-19 tersebut

tampak sekali perubahan pen bekel yang secara berlahan bergerak dari aktivitas ekonomi politik, la merupakan bagian dari politik kolonial untuk melakukan eksploitasi.

Namun karena masih begitu kuatnya ikatan solidaritas komunal di pedesaan Surakarta, perluasan perusahaan perkebunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah kolonial menghadapi Hambatan yang berupa sistem apanage. sistem ini adalah kendala besar bagi proses industrialisasi dan komersialisasi pemerintah kolonial. Dalam sistem apanage ini masih berlaku berbagai macam kerja wajib yang terikat secara organik dalam ikatan feodal. Tentunya model seperti ini adalah hambatan dalam proses modernisasi. Oleh karena itu pemerintah kolonial ingin mengubah kerja wajib menjadi kerja upah yang membebaskan petani dari ikatan kerja tradisional. Para petani berhak memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dengan imbalan upah. Cara lain untuk menghapus hambatan tersebut, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi (perombakan), yaitu dengan menata kembali kedudukan tanah desa dan membentuk administrasi pemerintahan desa. Dalam usaha penataan tersebut, penghapusan apanage mau tidak mau harus dilakukan. Karena dengan adanya perubahan status apanage dari wewenang anggaduh (hak mengerjakan) menjadi wewenang pandarbe (hak milik) akan memudahkan pelaksanaan kontrak tanah.

Keterkaitan antara kemiskinan dan kriminalitas dengan apanage dan bekel dapat dilihat melalui pengaruh perubahan sosial yang terjadi di pedesaan Surakarta dan Jawa pada abad ke-19. Ketidakteraturan sosial yang berlangsung di ruang kota membuktikan ketidakmampuan negara kolonial dalam mengatur warga kota, yang mungkin menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas yang lebih tinggi. Penguasa lokal yang terkonversi ke dalam informal services atau *illegal agency* di perkotaan mungkin menjadi sumber kriminalitas yang lebih tinggi, yang mungkin menyebabkan kemiskinan yang lebih tinggi.

PRAKTIK APANAGE DAN BEKEL

Sistem apanage bekel muncul dari konsep bahwa penguasa adalah pemilik seluruh tanah di wilayah kerajaan. Untuk menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh seperangkat pejabat kerajaan yaitu, patuh. Sebagai imbalannya, patuh mendapatkan tanah Apanage yang terletak di negara agung. Tanah ini merupakan tanah jabatan. Selain itu para patuh berhak mendapatkan layanan kerja dan sebagian hasil Apanage. Dalam masyarakat tradisional, bekel menguasai seluruh tenaga kerja yang ada di tanah apanage. Antara tahun 1839-1920 terjadi perubahan status terkait peranan bekel di pedesaan Surakarta. Bekel menguasai seluruh tenaga kerja yang ada di tanah apanage, setelah tanah tersebut disewa oleh perusahaan perkebunan, hak-hak yang ada pada patuh beralih kepada perusahaan perkebunan.

Selama abad ke-19 tersebut tampak sekali perubahan pen bekel yang secara berlahan bergerak dari aktivitas ekonomi men politik, la merupakan bagian dari politik kolonial untuk melakukan eksploitasi. Namun karena masih begitu kuatnya ikatan solidaritas komunal di pedesaan Surakarta, perluasan perusahaan perkebunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah kolonial menghadapi hambatan yang berupa sistem apanage.

Keterkaitan antara kemiskinan dan kriminalitas dengan apanage dan bekel dapat dilihat melalui Pengaruh perubahan sosial yang terjadi di pedesaan Surakarta dan Jawa pada abad ke-19. Ketidakteraturan sosial yang berlangsung di ruang kota membuktikan ketidakmampuan negara kolonial dalam mengatur warga kota, yang mungkin menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas yang lebih tinggi. Penguasa lokal yang terkonversi ke dalam informal services atau *illegal agency* di perkotaan mungkin menjadi sumber kriminalitas yang lebih tinggi, yang mungkin menyebabkan kemiskinan yang lebih tinggi.

PERLUASAN PERKEBUNAN DAN SIFAT DASAR BANDITISME

Timbulnya perkebunan dan tanah-tanah partikelir di Jawa adalah babak baru bagi ekonomi perkebunan. Dengan kata lain terjadi perubahan perekonomian yang semula

didominasi oleh perekonomian tradisional kemudian digantikan oleh perekonomian yang didominasi tanaman perdagangan dan mengalami perubahan sosial yang dikembangkan sebagai perkebunan. Di Banten -Batavia banyak tanah partikelir yang mengusahakan bahan pangan dan barang ekspor. Asal mula tanah partikelir ini berasal dari tanah-tanah penjualan oleh VOC yang terdapat di sepanjang pantai utara termasuk daerah bogor dan pariangan. Pertanian merupakan aset utama bagi eksistensi dan kelangsungan hidup agraris sejak timbulnya masyarakat bermata pencaharian petani yang mengolah tanah dengan intensif baik berupa sawah atau ladang. Hasil pertanian itulah yang menghidupi masyarakat secara turun temurun yang tidak dipisahkan dari tenaga kerja petani. Namun perekonomian rakyat dikuasai oleh tuan-tuan tanah partikelir, di Yogyakarta-Surakarta dengan adanya penguasa kerajaan kehidupan ekonomi rakyat ditekan oleh ekonomi kerajaan dan perkebunan. Meskipun di Pasuruan-Probolinggo dapat dikatakan hanya ada tanah gubernemen, tetapi karena kedudukannya sangat kuat maka ekonomi rakyat sangat ditekan untuk menghidupi ekonomi perkebunan.

Kehidupan petani di tanah partikelir memang berat karena berbagai pajak dan layanan, disebut cuke seperlima dari panen, harus diserahkan kepada tuan-tuan tanah Belanda dan cina, pada dasarnya petani yang tinggal di tanah-tanah mereka harus membayar pajak antara lain berupa sebagian hasil panen, uang, layanan tenaga kerja. Petani mendapat bagian yang kecil sekali kalau dihitung bagian panen itu tidak cukup untuk hidup. Kehidupan petani di Vorsttenlanden juga mengalami keadaan serupa, khususnya di daerah subur Pendapatan petani dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan biaya produksi, termasuk pajak penyerahan wajib, dan sumbangan. Sejak adanya perluasan perkebunan banyak diperlukan bukan hanya tenaga laki-laki, tetapi juga tenaga wanita dan anak-anak, mereka dipekerjakan di gudang tembakau, kebun kopi, dengan upah separon laki-laki.

Sifat dasar perbanditan dipandang sangat subyektif, biasanya terminology itu muncul dari kalangan penguasa dalam hal ini pemerintah kolonial. Namun akhirnya istilah itu diterima masyarakat karena perbuatan perbanditan bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan sekelompok orang yang berkuasa. Selanjutnya pengertian perbanditan itu mencakup pengertian perampok berkawan, seorang yang mencuri, membunuh dengan cara kejam tanpa rasa malu, seorang yang mendapatkan keuntungan dengan tidak wajar. Diantara pakar yang meneliti tentang perbanditan Hobsbawn seorang sejarawan sosial Inggris mengatakan bahwa bandit adalah seorang dari anggota kelompok yang menyerang dan merampok dengan cara kekerasan. Namun demikian bandit dibedakan atas bandit biasa dan bandit sosial. Sedangkan bandit sosial adalah perbuatan seorang untuk merampok yang dilator belakangi dengan kepentingan sosia-politik. Jelas perbanditan ini mengandung pengertian protes sosial terhadap pemerintah atau perkebunan yang melakukan tindakan merugikan terhadap petani. Gerakan perbanditan itu dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan, dan eksploitasi khususnya untuk perbanditan di Pedesaan Jawa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil studi tentang kemiskinan dan kriminalitas menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kriminalitas. Studi juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Selain itu, kemiskinan menyebabkan peningkatan tindak kriminalitas, yang terutama dilakukan oleh anak-anak usia di bawah umur dan remaja. Salah satu cara untuk memerangi kriminalitas adalah dengan menggunakan hukuman atau sanksi, yang masih efektif.

B. Saran

Untuk mendapatkan pemahaman tentang sejarah kemiskinan dan kejahatan yang terkait dengan apanage dan banditisme, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh tentang perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi selama periode tersebut. Studi ini berfokus pada analisis bagaimana sistem apanage mempengaruhi distribusi kekayaan dan keadilan sosial, dan bagaimana banditisme muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan. Akan lebih mudah untuk membuat strategi untuk mencegah dan menangkal kriminalitas dan kemiskinan dalam konteks sejarah dengan memahami dinamika ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Ribawati, M.Pd, Dr. H. Agus Rustamana, M.Pd. "Sejarah Sosial Ekonomi Kajian Masyarakat Jawa dan Banten". Penerbit Media Edukasi Indonesia, tahun 2023.
- Ryantino Paundra Nagari. 2015. Bandit Pedesaan Jawa. Universitas Gajah Mada
- Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel. Tiara Wacana Yogya.